

**DAMPAK KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
DI KPH GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus: KTH Rimbe Pasmah)**

(Skripsi)

Oleh

**SENI RAHAYU
2214151032**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DAMPAK KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) DI KPH GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus: KTH Rimbe Pasmah)

Oleh

SENI RAHAYU

Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan berbasis partisipasi masyarakat. Salah-satu bentuk dari Perhutanan Sosial yang sudah berjalan yaitu pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbe Pasmah di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis, menghitung tingkat pendapatan dari pertanian Perhutanan Sosial dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pada KTH Rimbe Pasmah. Penelitian dilaksanakan pada bulan September–Oktober 2025 dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode observasi secara langsung. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terstruktur terhadap anggota KTH yang dipilih menggunakan teknik random sampling dengan jumlah responden sebanyak 50 orang. Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif menggambarkan karakteristik responden dan tingkat pendapatan, serta analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan anggota KTH Rimbe Pasmah dari kegiatan Perhutanan Sosial tergolong rendah apabila dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan. Faktor yang diuji terdiri dari usia, pendidikan, pekerjaan utama, luas lahan, dan jumlah jenis tanaman. Variabel luas lahan memiliki pengaruh nyata terhadap faktor pendapatan dengan nilai $P\text{ value}=0,027$ artinya adanya pengaruh terhadap pendapatan. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan lahan, diversifikasi jenis tanaman bernilai ekonomi, serta penguatan kapasitas kelembagaan KTH menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan kegiatan Perhutanan Sosial.

Kata kunci: kelompok tani hutan, perhutanan sosial, pendapatan, regresi linear berganda, random sampling, kth rimbe pasmah

ABSTRACT

THE IMPACT OF SOCIAL FORESTRY ACTIVITIES ON THE INCOME OF FOREST FARMERS GROUP (KTH) MEMBERS AT GEDONG WANI KPH, SOUTH LAMPUNG REGENCY LAMPUNG PROVINCE (Case Study: KTH Rimbe Pasmah)

By

SENI RAHAYU

Social Forestry is one of the strategic policies of the Indonesian government in the equitable distribution of the community's economy through sustainable forest management based on community participation. One of the forms of Social Forestry that has been running is the Forest Farmers Group Rimbe Pasmah Farmers Group in Mulyosari Village, Tanjung Sari District, South Lampung Regency. This study aims to analyze, calculate the income level of Forest Farmers Group from Social Forestry agriculture and also analyze the factors that affect the level of Social Forestry income in Forest Farmers Group Rimbe Pasmah. The research was carried out in September–October 2025 with a quantitative approach using direct observation methods. Data was collected through questionnaires and structured interviews with selected Forest Farmers Group members using random sampling techniques with a total of 50 respondents. Data analysis was conducted using descriptive analysis to describe respondent characteristics and income levels, as well as multiple linear regression analysis to identify factors influencing income. The results of the study show that the income of Forest Farmers Group Rimbe Pasmah members from Social Forestry activities is still relatively low when compared to the South Lampung Regency Minimum Wage (UMK). The factors tested consisted of age, education, main occupation, land area, and number of plant types. The land area variable has a real influence on the income factor with a value of $P \text{ value} = 0.027$ so that it can be said that the land area is significant to income. These findings show that optimizing land use, diversifying crop species with economic value, and strengthening the institutional capacity of Forest Farmers Group are important factors in increasing income and sustainability of Social Forestry activities.

Keywords: *farmer groups, social forestry, income, multiple linear regression, random sampling, kth rimbe pasmah*

**DAMPAK KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
DI KPH GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG (Studi Kasus: KTH Rimbe Pasmah)**

Oleh

SENI RAHAYU

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: DAMPAK KEGIATAN PERHUTANAN SOSIAL
TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) di KPH
GEDONG WANI KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN PROVINSI LAMPUNG (STUDI
KASUS: KTH RIMBE PASMAL)**

Nama Mahasiswa

: Seni Rahayu

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2214151032

Jurusan

: Kehutanan

Fakultas

: Pertanian



Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.
NIP.196412231994031003

Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.
NIP 196906011998021002

Ketua Jurusan Kehutanan

Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM.
NIP 197310121999032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

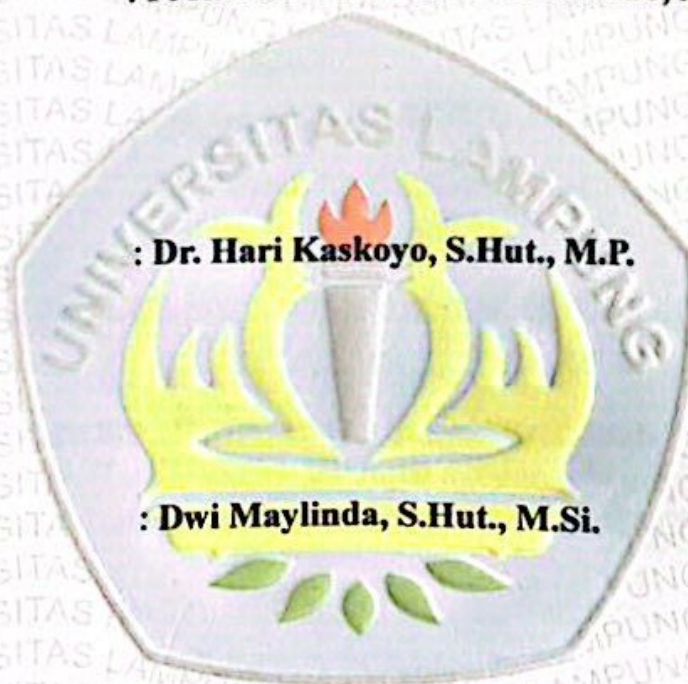
: Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

Sekretaris

: Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.

Anggota

: Dwi Maylinda, S.Hut., M.Si.



2. Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

NIP 196411181989021002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Seni Rahayu

NPM : 2214151032

Jurusan : Kehutanan

Alamat Rumah : Dusun Waysom RT/RW 006/002 Kampung Kotaagung,
Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Dampak Kegiatan Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan (Kth) Di Kph Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Studi Kasus: KTH Rimbe Pasmah)”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 06 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Seni Rahayu
NPM 2214151032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Seni Rahayu, yang akrab disapa Seni, Ayu, atau Rahayu, lahir di Kotaagung, Tanggamus pada 05 Juli 2004. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Subaidi dan Ibu Mainah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Kampung Kotaagung pada tahun 2010–2016, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Negeri 1 Tanggamus 2017–2019, serta menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Kotaagung pada tahun 2020–2022. Pada tahun 2022, penulis resmi diterima sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan dengan Beasiswa Pendidikan KIP/K Kuliah.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan akademik. Penulis terlibat dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forkom Bidikmisi KIP/K Unila pada bidang Advokasi pada tahun 2022/2024, aktif dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva) sebagai anggota aktif, serta mengikuti kegiatan diluar kampus yaitu Start Community (*Responsibility of social, education, and sanitation*) pada tahun 2024/2026 sebagai anggota dan sebagai Fasilitator dalam kegiatan SMARTLY 2024/2025. Kegiatan keprofesian yang pernah diikuti antara lain Tim Penelitian Ekspedisi Himasyulva pada tahun 2024/2025 di Taman Nasional Way Kambas sekaligus magang pada tahun 2024 di Taman Nasional Way Kambas, khususnya di Stasiun Penelitian Riset Rawa Bunder, Lampung Timur, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Betung, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Januari–Februari 2025.

Selain itu, penulis mengikuti Praktik Umum (PU) selama 20 hari di Hutan Pendidikan Wanagama, meliputi KHDTK Getas, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan KHDTK Wanagama, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2025. Penulis juga pernah menjadi asisten praktikum mata kuliah Kewirausahaan dan Ekowisata pada semester ganjil tahun 2024.

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan pertolongan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Dampak Kegiatan Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kph Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (Studi Kasus: KTH Rimbe Pasmah)" yang dapat diselesaikan dengan baik sehingga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Kehutanan di Universitas Lampung.

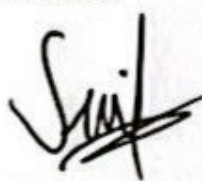
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut berperan penting dalam mendukung dan memotivasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., ASEAN Eng., Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM. selaku Kepala Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S. selaku dosen pembimbing pertama, dan selaku dosen Pembimbing Akademik penulis, yang memberikan motivasi dan dukungan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi dan selama masa perkuliahan.
5. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. selaku dosen pembimbing kedua, yang juga telah memberikan dukungan dan nasihat penuh kasih, yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.

6. bernilai serta memperluas wawasan penulis dalam penyempurnaan penelitian ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf administrasi Jurusan Kehutanan beserta jajarannya, telah memberikan ilmu, pengalaman, dan sudah membantu dalam proses administrasi selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh Bapak/Ibu dari KPH Gedong Wani dan KTH Rimbe Pasmah yang sudah memberikan dukungan dan kesempatan serta berbagi pengalaman kepada penulis dalam pengambilan data.
9. Kepada kedua orang tua yang penulis sayang dan cinati, cinta pertama dan pintu surgaku. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, tetapi dukungan, semangat, doa, motivasi dan kerja keras tanpa henti serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis hingga penulis bisa bertahan sampai dititik penyelesaian skripsi ini.
10. Dafit Febian, Berli Suganda, dan Muhammad Kenzi Ramadhan selaku adik penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi, serta menjadi sumber semangat dan teladan bagi penulis untuk bertahan dan menyelesaikan proses perkuliahan hingga tahap ini.
11. Desta Apriyani dan Mashudi Zaein selaku abang dan kakak penulis serta keluarga besar Saleh yang dengan doa, dukungan, dan semangatnya telah menjadi sumber motivasi dan tanggung jawab moral bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Dio Agung Novriansyah, Cantika Romadhina, Yeni Anggaraini selaku sahabat penulis, juga orang penulis sayangi yang setia kebersamaan sejak sekolah menengah pertama hingga perkuliahan yang selalu sigap untuk direpotkan, berbagi cerita dalam setiap proses, serta senantiasa hadir dengan dukungan dan semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini.
13. Keluarga Cemara (Salwa Lathifa Hanun, Nur Fikhadillah, Niken Aurora Iwais, Dera Triaswati, Vicky Puja Wahanawati, Dhea Ayu Lestari, dan Felicia Tiffani Nursuri) sahabat dari awal maba hingga saat ini, yang membantu, mendukung, dan memotivasi penulis selama di perantauan hingga mampu menyelesaikan tugas akhir.

13. Para Cegile (Nur Fikhadillah, Salwa Lathifa Hanun, Deta Putri, Miftahus Sa'adah, Silvina Adelia, dan Novi Yunita Larasati) yang sejak awal hingga saat ini setia berjalan beriringan, berbagi keluh kesah, saling menguatkan dengan doa dan semangat yang sama dalam menjalani seluruh proses perkuliahan.
14. Tim Skripsi (Puspa Patrecia, Tania Vinasty, Roro Ajeng, Fhatiyah Alda, dan Salsabya Citra Azkya) yang sejak awal penyusunan skripsi telah berjalan bersama, saling memotivasi, dan berjuang bersama mulai dari pengambilan data, penulisan, hingga revisi dan persetujuan akhir.
15. Saudara seperjuangan Kehutanan angkatan 2022 (REXTERION) dan keluarga besar Himasyilva Universitas Lampung, yang telah memotivasi dan memberikan semangat juang.
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini, meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun peran serta dan dukungan mereka sangat berarti.
17. Terakhir, sebelum penulis akhiri, *"Beberapa anak memang terlahir beruntung, ditengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena di beri hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri menyelesaikan apa yang sudah dimulai"* kalimat tersebut yang pernah penulis baca dan membuat penulis bisa bertahan hingga titik ini.
18. Teruntuk Penulis, Seni Rahayu, terima kasih sudah berusaha dan tidak Lelah dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup dan kekecewaan. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.

Bandar Lampung, 06 Februari 2026
Penulis



Seni Rahayu

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: "fa inna ma'al-'usri yusra, inna ma'al-'usri yusra" dan "la yukallifullahu nafsan illa wus'aha" Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Insyirah 94:5-6 dan QS. Al-Baqarah:286)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release”

(Tylor Swift)

“ Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan“

(Maudy Ayunda)

“Perihal rupa siapa yang tak terpikat? Namun akal dan sikap jauh lebih menetap, sebab wajah bisa pudar oleh waktu, sedangkan kecerdasan isi kepala akan tumbuh sepanjang hidup”

DAFTAR ISI

	Halaman
SANWACANA.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.2. Tujuan Penelitian	4
1.3. Kerangka Pemikiran	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani.....	6
2.2. Perhutanan sosial	7
2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH).....	11
2.4. Hutan Produksi	13
III. METODOLOGI PENELITIAN.....	15
3.1. Waktu dan Tempat	15
3.2. Alat dan Bahan	16
3.3. Jenis Data	16
3.4. Populasi dan Sampel	18
3.5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Karakteristik Responden	23
4.2. Tingkat Pendapatan Responden.....	32
4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan	41
V. KESIMPULAN DAN SARAN	46
5.1. Simpulan.....	46
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
1. Klasifikasi tingkat pendapat dari Perhutanan Sosial	33
2. Pengaruh variabel responden terhadap pendapatan.	41

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	5
2. Peta Lokasi Penelitian.....	15
3. Peta Areal Kerja	16
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia	24
5. Karakteristik Responden KTH Rimbe Pasmah Berdasarkan Jenis Kelamin	25
6. Karakteristik Responden KTH Rimbe Pasmah Berdasarkan Pekerjaan	26
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
8. Karakteristik Responden berdasarkan Tanggungan Keluarga.....	29
9. Luas Lahan Responden KTH Rimbe Pasmah.....	30
10. Jumlah Jenis Tanaman Responden.....	31
11. Jenis lebah <i>Trigona sp</i>	40
12. Jenis lebah <i>Tigona itama</i>	40

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Halaman
1. Hasil jawaban dari semua responden	57
2. Karakteristik Responden	59
3. Foto Bersama Ketua KTH	63
4. Lokasi KUPS Lebah Madu	63
5 Lokasi Lahan singkong	65
6. Pengamatan pada lebah Madu	64
7. Penempatan Posisi Stup Madu	64
8. Foto Bersama di Lahan RHL	65
9. Diskusi Bersama Pengurus	66
10. Wawancara dengan Ketua KTH Rimbe Pasmah.....	66
11. Wawancara dengan Responden	67

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aktivitas menjaga pelestarian hutan merupakan tanggung jawab masyarakat yang berada di sekitar hutan maupun yang tidak, tetapi lebih dominan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Masyarakat seringkali hidup dalam kondisi yang selalu bergantung kepada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga ditambah tingkat pengetahuan mereka terkait pengelolaan hutan yang berkelanjutan masih cukup rendah (Dewi, 2018). Pemerintah mengambil langkah-langkah perlindungan hutan agar tetap lestari, mencegah kerusakan agar dapat dimanfaatkan untuk generasi berikutnya mengingat bahwasanya hutan berperan sangat penting bagi masyarakat dan dunia. Praktik pembukaan lahan perubahan fungsi hutan yang menjadi pemukiman seringkali menjadi ancaman bagi kelestarian hutan (Totok dan Poerwoko, 2015) yaitu sebagai solusi dalam pengelolaan hutan yang bijaksana, Pemerintah Republik Indonesia telah merancang dan mengembangkan program perhutanan sosial (Fardiansyah *et al.*, 2022)

Program ini menghadirkan harapan baru bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, dengan memberikan akses hukum untuk mengelola sumber daya hutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Program perhutanan sosial bertujuan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan taraf hidup, dan menjamin kelestarian hutan (Toha *et al.*, 2023). Menurut Rahayu dan Triwanto (2021), program ini juga memberikan pedoman terkait pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan, serta pengaturan hutan adat. Dengan demikian, perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip

keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung jawab. Perhutanan sosial disebut juga dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yakni suatu sistem pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan hutan negara atau bukan negara yang dilaksanakan oleh masyarakat di daerah atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil lingkungan, dan dinamika sosial budaya masyarakat tersebut (Rakatama dan Randit, 2022).

Program ini menjelaskan komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan. Komitmen yang diberikan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yakni akses kelola hutan kepada masyarakat secara legal, sehingga kesejahteraan bagi masyarakat akan meningkat dan juga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kebijakan ini memberikan skema hak kelola kepada masyarakat dan juga disertai pendampingan dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari.

Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya, juga terdapat Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial, Rencana kelola Perhutanan Sosial dan juga Rencana Kerja Tahunan. Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat setempat berperan sebagai mitra pemerintah, dengan memanfaatkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola berdasarkan skema hak guna pakai, bukan hak milik (Fauzi *et al.*, 2021). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Safe'i *et al* (2018), program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan HKm didasarkan pada prinsip mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan secara optimal dan adil, dengan pendekatan yang lestari (Haikal *et al.*, 2020).

Dalam perencanaan pengelolaan hutan, terdapat aturan-aturan yang disepakati oleh pengelola HKm. Proses penyusunan peraturan ini melibatkan kehadiran serta kesepakatan bersama antara pemerintah, pengurus, dan anggota kelompok tani hutan. Masyarakat menunjukkan komitmen mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan hutan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Ini menjadi bukti bahwa norma sosial dalam perencanaan pengelolaan hutan terjalin dengan baik dan dijalankan oleh anggota kelompok tani (Adrayanti *et al.*, 2022). Pengembangan kelompok tani ditujukan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam mengembangkan agribisnis, serta memperkuat kelompok tani menjadi organisasi petani yang tangguh dan mandiri (Wulansari *et al.*, 2022).

Kelompok Tani Hutan (KTH) Rimbe Pasmah adalah salahsatu KTH dari 19 (Sembilan belas) KTH/Gapoktanhut pemegang persetujuan Perhutanan Sosial di wilayah kerja KPH Gedong Wani. KTH Rimbe Pasmah terletak di Desa Mulyosari Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, yang memiliki areal Perhutanan Sosial seluas $\pm 242,88$ hektare pada kawasan hutan produksi tetap. Mayoritas masyarakat di Desa Mulyosari berprofesi sebagai petani dan pedagang. Wilayah ini memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Para kelompok tani mengelola hasil hutan, baik yang bersifat kayu maupun bukan kayu, serta jasa lingkungan.

Perubahan legalitas yang terkait dengan pengelolaan hutan kemasyarakatan ini tentu akan berpengaruh pada pendapatan KTH. Pendapatan KTH sendiri merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan program Perhutanan Sosial, yang juga harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan (Nurfatriani dan Alviya, 2019). Adanya peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan, diharapkan kesejahteraan mereka dapat meningkat serta kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan juga dapat terbangun. Berdasarkan penjelasan di atas, sangat diperlukan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai pendapatan KTH terkait dengan Perhutanan Sosial dalam upaya menjaga kelestarian hutan di KPH Gedong Wani, dengan KTH Rimbe Pasmah sebagai studi kasusnya.

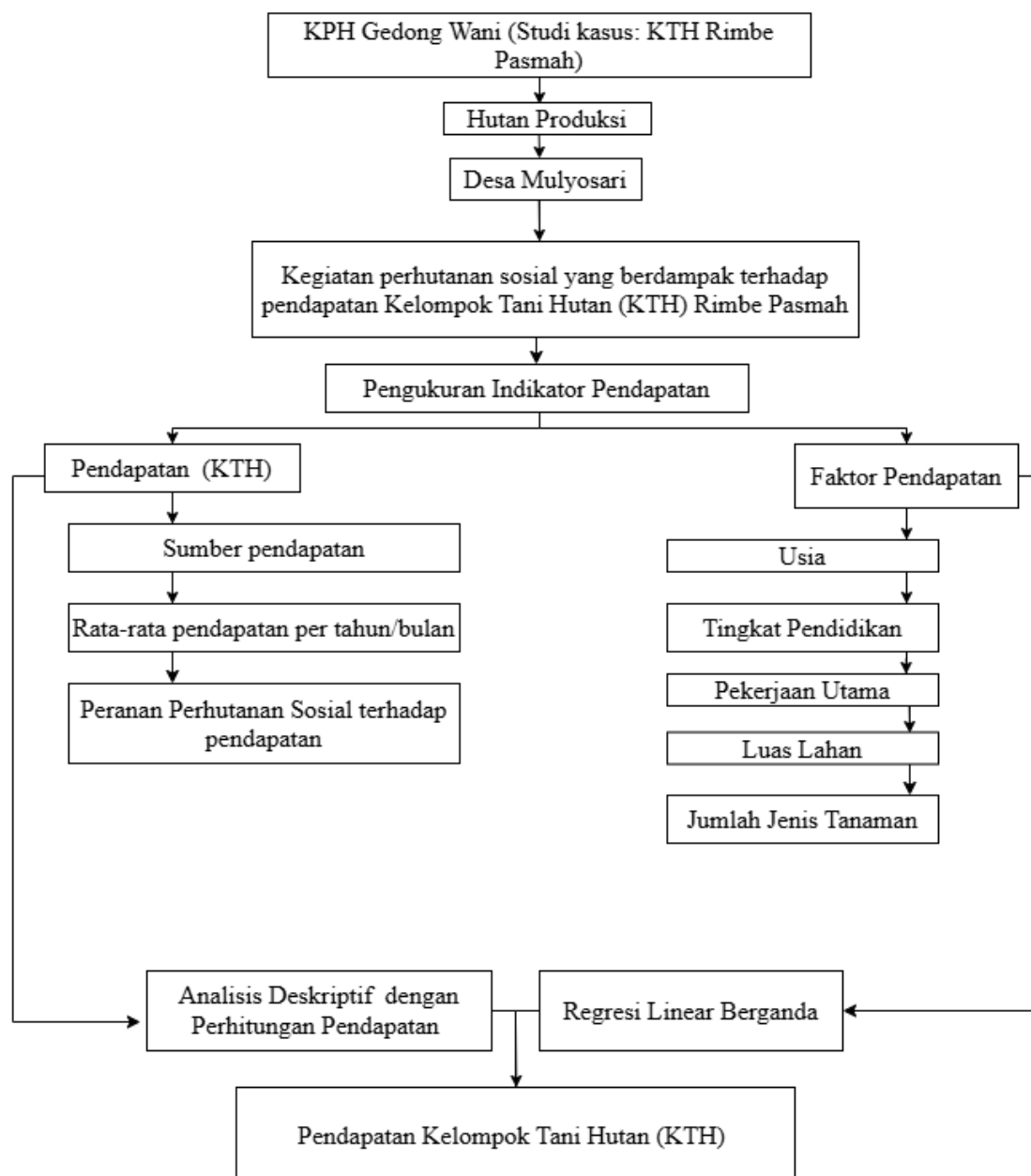
1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Dampak Kegiatan Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan KTH Rimbe Pasmah di KPH Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (studi kasus: KTH Rimbe Pasmah) ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan menghitung tingkat pendapatan KTH dari pertanian perhutanan sosial
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan Perhutanan Sosial KTH Rimbe Pasmah.

1.3. Kerangka Pemikiran

Perhutanan Sosial telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional dalam upaya menciptakan Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Program ini berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. KPH Gedong Wani merupakan salah satu area yang menerapkan perhutanan sosial, dimana pengelolaan dilakukan melalui pemanfaatan hutan produksi. Namun, berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan dan kerusakan hutan menjadi tantangan yang harus dihadapi dari sudut pandang ekonomi, pendapatan masyarakat menjadi indikator keberhasilan implementasi perhutanan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pendapatan KTH terkait pengaruh keberadaan perhutanan studi kasus KTH Rimbe Pasmah. Diagram alir yang menggambarkan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani ditetapkan wilayahnya berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor.427/Menhut-II/2011 tanggal 27 Juli 2011, yang merupakan keputusan lanjutan atas penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Lampung, yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010, dengan luasan wilayah sebesar ± 30.243 Ha. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL), Nomor.74/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2017 tanggal 13 Januari 2017, ditetapkan wilayah pengelolaan KPH Gedong Wani, menjadi seluas $\pm 28.343,91$ Ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020, luas kawasan hutan KPH Gedong Wani menjadi 28.385,14 Ha. Kemudian pada Tahun 2022, sebagian kawasan KPH Gedong Wani telah dilepaskan untuk pembangunan Bendungan Margatiga melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.253/Menlhk/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap untuk Pembangunan Bendungan Margatiga atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas kurang lebih ± 254 Ha. Dengan demikian , luas wilayah Pengelolaan KPH Gedong Wani menjadi 28.131, 14 Ha. Namun belum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara geografis KPH Gedong Wani terbentang pada titik koordinat $105^{\circ}17' 40''$ sampai dengan $105^{\circ} 32'35''$ BT dan $05^{\circ} 10' 00''$ sampai dengan $05^{\circ} 32' 30''$ LS.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani mempunyai wilayah kerja dan wilayah administratif terdiri atas kawasan hutan negara meliputi KHP Gedong Wani Register 40, KHP Way Katibung I Register 5, KHP Way Katibung II Register 35 dan KHP Way Kibang Register 37; dan di luar kawasan hutan negara, meliputi wilayah administratif Kabupaten Lampung Timur (Kecamatan Metro Kibang, Batang Hari, Marga Tiga, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya), dan wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Sulan, Candipuro, Katibung, Merbau Mataram). Secara administratif pemerintahan, di KPH Gedong Wani terdapat 2 (dua) Kabupaten, yaitu Lampung Selatan dan Lampung Timur. 48 (empat puluh delapan) desa definitif dalam 14 (empat belas) Kecamatan. Ruang lingkup pengelolaan KPH Gedong Wani keseluruhannya merupakan Blok Pemanfaatan seluas 28.385,14 Ha yang terbagi dalam 3 (tiga) resort yaitu Katibung, Sekampung Ulu dan Kandis. Pengelolaan KPH Gedong Wani diarahkan pada upaya peningkatan tutupan lahan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan akses legal pengelolaan hutan melalui kegiatan percepatan Perhutanan Sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan hutan, penggunaan hutan melalui kegiatan pembatasan kerusakan hutan dan konservasi (RPHJP KPH Gedong Wani Tahun 2024-2033; 2024).

2.2. Perhutanan sosial

Perhutanan sosial di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), merupakan suatu sistem untuk mengelola hutan secara berkelanjutan di kawasan hutan negara maupun hutan non-negara. Sistem ini diimplementasikan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, manfaat lingkungan, serta dinamisasi sosial budaya komunitas yang bersangkutan (Rakatama dan Randit, 2022). Oleh karena itu, masyarakat perlu mampu mengelola perhutanan sosial dengan mempertimbangkan keseimbangan antara norma hukum adat dan peraturan daerah yang berlaku. Istilah perhutanan sosial sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Perhutanan Sosial. Meskipun namanya

berbeda, namun esensinya tetap sama dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM).

Perhutanan Sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dilaksanakan di kawasan hutan negara maupun hutan hak atau hutan adat. Dalam hal ini, masyarakat lokal atau komunitas hukum adat memegang peranan penting. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan kesetaraan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan (Dewi, 2018). Upaya ini mencakup pemberian akses legal kepada masyarakat setempat melalui pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sebagai bagian dari Program Strategis Nasional yang bertujuan untuk menciptakan Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan), Perhutanan Sosial hadir untuk mengatasi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumber daya hutan. Program ini memiliki misi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, khususnya bagi komunitas yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa akses pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan secara aman dan tepat sasaran. Penerima program ini biasanya memenuhi kriteria tertentu, antara lain masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin, memiliki lahan sempit atau tidak memiliki lahan, serta yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Ada lima skema dalam Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat. Untuk akses legal, terdapat berbagai terminologi seperti Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan Pengakuan serta Perlindungan Hutan Adat (Mahardika dan Mulyani, 2021).

Sistem pengelolaan seperti agroforestry, hutan tanaman rakyat, serta integrasi pertanian dan kehutanan dalam bentuk perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan di sektor kehutanan (Farid *et al.*, 2022). Melalui

program perhutanan sosial ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberikan akses legal terhadap lahan yang mereka garap. Program perhutanan sosial dirancang untuk memberikan pedoman mengenai hak pengelolaan, perizinan, kemitraan, dan hutan adat. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi solusi terhadap permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang hidup di sekitar hutan, agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya hutan demi kesejahteraan sekaligus pelestarian, berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, legalitas, partisipasi, serta akuntabilitas (Rahayu dan Triwanto, 2021).

Sumber daya kehutanan memiliki peran penting sebagai penyeimbang dalam memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Kawasan hutan berfungsi sebagai pengatur hidrologis dan klimatologis, serta menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan, baik yang bersifat hayati maupun non-hayati. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di hutan, perlu ada adaptasi dengan masyarakat dan kearifan lokal yang ada, sehingga keseimbangan ekologi dapat tercapai. Dalam menghadapi tantangan tersebut, penting untuk membangun sistem pengelolaan hutan yang efektif sebagai langkah nyata di lapangan, serta menciptakan kesadaran dan budaya di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Pemanfaatan budaya lokal sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan menjadi alternatif yang sangat baik dalam rangka membentuk kesadaran kolektif (Rahman dan Jalaluddin, 2022).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara pengelola hutan dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal. Dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, penting untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai aktor utama yang memiliki interaksi langsung dengan hutan (Sanjaya, 2016). Konsep yang dimaksud di sini adalah partisipasi masyarakat, yang telah menjadi bagian integral dalam diskursus pembangunan selama dua dekade terakhir. Selama periode ini, partisipasi masyarakat merujuk pada keikutsertaan dalam berbagai aspek sosial, masyarakat, maupun proyek pembangunan (Winata *et al.*, 2015). Perkembangan saat ini,

partisipasi semakin erat kaitannya dengan hak-hak kewarganegaraan dan praktik pemerintahan yang demokratis. Hal ini sejalan dengan sistem pengelolaan hutan kemasyarakatan, di mana masyarakat berperan sebagai pengelola di tingkat lokal, sesuai dengan prinsip partisipasi. Dengan demikian, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dan bermanfaat dalam pengelolaan kawasan hutan di sekitarnya (Witno *et al.*, 2020). Tentu saja, untuk mewujudkan konsep ini diperlukan peran penyuluh yang terampil dan berpengetahuan dalam pengelolaan hutan, termasuk hutan kemasyarakatan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan tersebut (Huzaini *et al.*, 2023). Hutan kemasyarakatan dirancang sebagai sistem pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sambil tetap menjaga fungsi hutan agar tetap lestari (Ayudanti, 2017). Tujuannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara adil dan berkelanjutan. Dalam perencanaan pengelolaan hutan, disusun aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh pengelola HKm, yang melibatkan pemerintah, ketua, dan anggota kelompok tani hutan. Proses penentuan aturan tersebut merupakan bagian penting dari perencanaan pengelolaan hutan, di mana ditentukan juga sanksi bagi pihak yang melanggar. Keberadaan norma sosial yang kuat dalam perencanaan ini tercermin dari partisipasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan tersebut, yang menunjukkan kesepakatan untuk mematuhi peraturan yang ada (Adrayanti *al.*, 2022).

Manfaat HKm terbagi ke dalam tiga aspek diantaranya manfaat HKm bagi masyarakat melalui pemberian izin kelola HKm dan memberikan kepastian hak akses untuk turut mengelola kawasan hutan. Masyarakat atau kelompok tani HKm menjadi pasti untuk berinvestasi dalam kawasan hutan, manfaat HKm bagi pemerintah serta manfaat HKm terhadap fungsi Hutan dan Restorasi Habitat (Cahyaningsi *et al.*, 2006 dalam Simarmata dan Tarigan, 2023). Pengelolaan hutan kemasyarakatan dilakukan oleh masyarakat lokal dalam kemitraan dengan pemerintah, dengan memanfaatkan area kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) sebagai kawasan yang dikelola berdasarkan skema hak guna pakai, bukan hak milik. Penerapan Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan di kawasan hutan lindung

dan hutan produksi yang tidak terikat oleh hak atau izin. Melalui pemanfaatan hasil hutan di kawasan ini, diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan tinggal di dalam serta sekitar kawasan hutan, yang mengandalkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya hutan (Fauzi dan Nahlunnisa, 2021).

2.3. Kelompok Tani Hutan (KTH)

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma yang signifikan. Dari awal yang terlalu berfokus pada pendekatan berbasis perusahaan, terutama di era Orde Baru, kini beralih menuju pengelolaan yang lebih mengedepankan partisipasi masyarakat. Perubahan ini mulai terlihat sejak akhir masa pemerintahan orde baru dan terus berlanjut hingga saat ini. Paradigma baru yang memanfaatkan pendekatan berbasis masyarakat ini dikenal dengan istilah *community forestry* atau kehutanan masyarakat. Keberadaan KTH, yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama sekelompok individu, sangat penting untuk menciptakan visi dan misi bersama dalam meningkatkan kesejahteraan. KTH akan lebih langgeng dan berarti jika dibentuk dari inisiatif masyarakat sendiri, bukan hanya sebagai hasil dorongan penyuluh (Simarmata *et al.*, 2023).

Sebagai bagian integral dari masyarakat, Kelompok Tani Hutan bukan hanya menjadi target utama dalam penyuluhan kehutanan, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan kehutanan di tingkat lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 57/Menhut-II/2014, KTH didefinisikan sebagai kelompok petani atau individu warga negara Indonesia bersama keluarganya yang mengelola usaha dalam bidang kehutanan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mencakup hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Mengacu pada Peraturan Menteri yang membahas Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pengembangan kelompok tani diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis, serta memperkuat kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri (Wulansari *et al.*, 2022). Dengan demikian, Kelompok Tani Hutan memainkan peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian sumber daya hutan. Tentu saja, ini memerlukan dukungan yang baik dari kelompok tani hutan

yang tumbuh dan berkembang dengan landasan kebersamaan, keserasian, dan kesamaan kepentingan di dalam masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal, melalui pemberdayaan kelompok tani hutan.

Pemberdayaan kelompok tani hutan memerlukan pembinaan untuk mengembangkan program-program penyuluhan, agar keberadaan kelompoknya dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya. Masih ada keberadaan kelompoknya kurang dinamis dan kurang ada kemajuan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dan hanya mementingkan terrealisasinya program pembangunan yang berakibat pada anggota kelompok yaitu ketergantungan pada bantuan atau program-program pemerintah dan lembaga lainnya. Kondisi tersebut merupakan masalah yang harus segera dipecahkan, sehingga KTH dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam mengelola usaha taninya (Istiqomah *et al.*, 2021). Dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) tentunya dibentuk kestrukturannya mulai dari pemimpin dan juga anggota agar memudahkan dalam pelaksanaan produksi.

Struktur kelompok menggambarkan hubungan antara individu-individu dalam sebuah kelompok serta pengaturan peran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ukuran dan aturan yang diterapkan, umumnya, aturan dalam kelompok tidak tertulis dan hanya disepakati secara lisan, tetapi tetap dijalankan secara kolektif. Contoh-contoh aturannya meliputi larangan menebang pohon dan menanam sayuran di kawasan hutan lindung, di mana petani diperkenankan bertani di area hutan dengan syarat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Penelitian oleh Bangsawan *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa meskipun aturan-aturan ini tidak tertulis, semua anggota kelompok mampu memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Dengan adanya pemimpin, anggota kelompok bekerja sama dalam pengelolaan hutan, baik dalam upaya perbaikan maupun pemanenan hasil hutan.

Keberadaan KTH juga berperan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan anggota melalui pengembangan usaha berbasis sumber daya hutan (Ramadhan *et al.*, 2025). Program perhutanan sosial yang melibatkan KTH mampu meningkatkan pendapatan petani hutan sekaligus mendukung

keberlanjutan sumber daya hutan, terutama apabila kelompok diberi akses untuk mengelola lahan secara mandiri dan berorientasi pada pasar serta diversifikasi produk hasil hutan (misalnya madu, rotan, dan agroforestri) yang dapat menambah nilai ekonomi bagi anggota kelompok. Studi kasus di Kabupaten Malang melaporkan bahwa partisipasi aktif anggota KTH dalam pengelolaan sumber daya hutan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan anggota sekaligus menjaga tutupan lahan hutan sehingga kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dapat berjalan bersamaan .

Selain aspek ekonomi, peran kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam memperkuat jaringan sosial dan tata kelola internal juga krusial untuk keberhasilan pengelolaan hutan secara kolektif (Rizki *et al.*, 2025). Kelembagaan yang kuat memungkinkan kelompok memiliki arah yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pengelolaan hutan. Modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma, dan hubungan antaranggota berperan penting dalam menciptakan kerja sama yang solid di dalam kelompok. Selain itu, hubungan yang baik dengan pihak luar seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra usaha mampu memperluas akses terhadap informasi, pendampingan, serta bantuan teknis. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kapasitas KTH dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan hutan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun pemasaran hasil hutan. Kelembagaan yang efektif juga membuka peluang diversifikasi kegiatan usaha, seperti pengembangan ekowisata berbasis konservasi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Rohiman *et al.*, 2025). Dengan demikian, peran kelembagaan KTH tidak hanya mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan komunitas lokal.

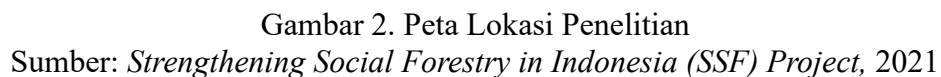
2.4. Hutan Produksi

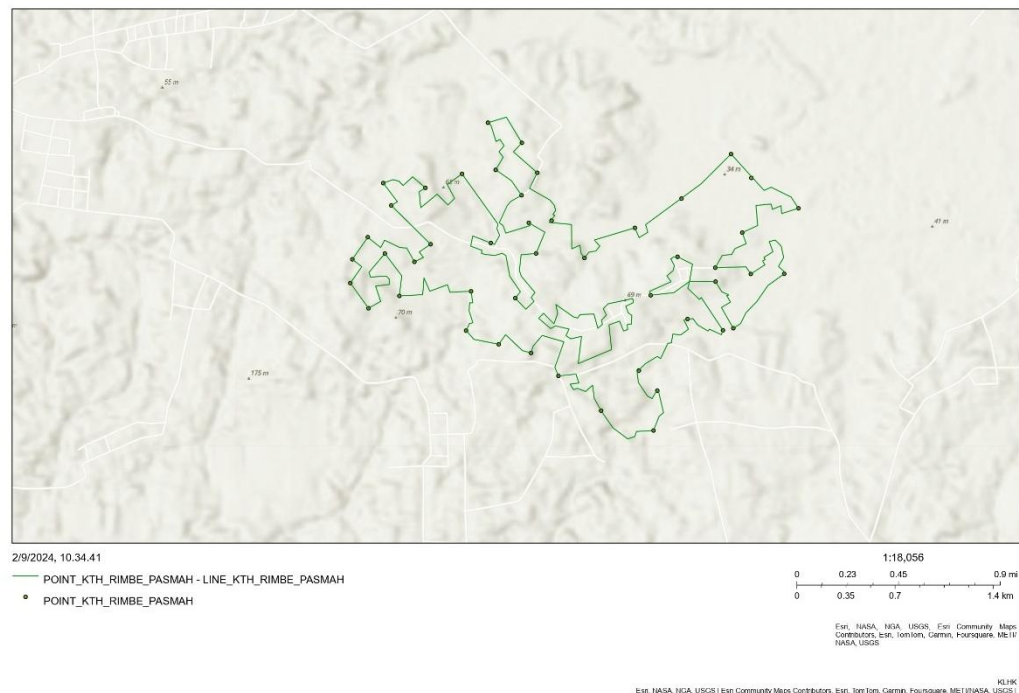
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dikelola untuk memproduksi hasil hutan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan ekspor. Dalam pengelolaannya, terdapat tiga jenis hutan produksi: Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi menawarkan berbagai manfaat, seperti budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanaman pangan di bawah tegakan, jamur, perlebahan, penangkaran satwa, dan

budidaya sarang burung walet (Saputra *et al.*, 2021). Agar pengelolaan hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan, penting untuk melaksanakan pengelolaan yang efektif. Pengelolaan hutan produksi mencakup serangkaian kegiatan, seperti pemanenan atau penebangan, penanaman, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mencapai manfaat ganda, yaitu menghasilkan kayu sekaligus mengatur tata air, menyediakan habitat bagi margasatwa, menjadi sumber makanan bagi manusia dan ternak, serta kawasan rekreasi (Suprianto, 2023). Sistem pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi dan budaya, serta memberikan manfaat kepada masyarakat pengelola dan masyarakat setempat, tanpa mengganggu fungsi utama hutan (Rosalia dan Ratnasari, 2016).

Melalui adanya hutan produksi ini masyarakat bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarganya. Hasil hutan yang didapatkan akan dikelola bisa menjadi barang jadi misal nya pada rotan atau bambu atau juga bisa menjadi bahan mentah yang di olah menjadi bahan makanan. Olahan yang dihasilkan bisa dijual dengan taraf harga yang lumayan tinggi, tetapi hal tersebut juga harus di hitung berdasarkan harga pasar dan juga harga produksi. Harga pasar juga biasanya ditetapkan berdasarkan jumlah permintaan dari konsumen, untuk harga jual misalnya singkong sendiri terkadang dijual dengan harga relatif sangat murah.

Selain sebagai sumber pendapatan, hutan produksi juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kegiatan pengelolaan hutan produksi, seperti pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu, pengolahan hasil hutan, hingga pemasaran produk, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam rantai produksi dan distribusi. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti madu hutan, jamur, bambu, dan tanaman pangan, memberikan peluang diversifikasi pendapatan sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi risiko ekonomi akibat fluktuasi harga pasar dan kegagalan panen. Pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan, hutan produksi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya hutan.





Gambar 3. Peta Areal Kerja KTH Rimbe Pasmah
 Sumber: *Strengthening Social Forestry in Indonesia (SSF) Project*, 2021

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data primer, Microsoft Excel sebagai perangkat lunak untuk pengolahan dan analisis data, serta laptop dan handphone sebagai sarana pendukung kegiatan penelitian. Selain itu, alat tulis digunakan untuk pencatatan data selama proses penelitian berlangsung. Peta lokasi penelitian juga digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami kondisi dan batas wilayah penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Hutan (KTH) Gedong Wani. Secara khusus, penelitian difokuskan pada KTH yang berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

3.3. Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan dari responden Perhutanan Sosial, luas lahan, pekerjaan utama, dan jumlah jenis tanaman, dokumentasi berupa foto saat wawancara, foto lahan

masyarakat, dan juga mencatat semua informasi yang didapatkan. Menurut Lakat *et al.*, (2021) Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat. Data ini harus dicari melalui responden (wawancara) kepada anggota dan pengurus KTH, yaitu orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan langsung. anggota dan pengurus KTH. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait dengan penelitian baik dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari KPH Gedong Wani, dan sumber yang terkait dengan penelitian lainnya. Berikut merupakan rangkaian pengambilan data.

a) Observasi

Observasi merupakan suatu usaha yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Abidin, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut, observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, observasi juga dapat disertai dengan tindakan serta pengajuan beberapa pertanyaan untuk memperjelas informasi yang diperoleh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi partisipan. Melalui metode ini, peneliti terlibat secara langsung sehingga dapat mencatat dan mengamati berbagai aktivitas, kondisi, serta kejadian yang terjadi di lokasi penelitian secara lebih mendalam dan akurat.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan responden atau pihak yang diteliti (Fandi, 2016). Metode wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan data secara langsung dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan pertanyaan dilakukan agar proses pengumpulan data berjalan secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, data yang diperoleh

melalui wawancara diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan relevansi yang tinggi.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pendokumentasian berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dan relevan dengan tujuan penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara tidak langsung dengan cara menelusuri dan menggali bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa atau aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Dokumentasi berperan sebagai sarana pengumpulan data melalui pencarian dan penelaahan berbagai sumber tertulis maupun visual. Sumber-sumber tersebut antara lain buku profil, catatan lapangan, surat kabar, transkrip, buku-buku referensi, foto, serta agenda kegiatan. Dengan demikian, data yang diperoleh melalui dokumentasi dapat melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

d) Studi Pustaka

Studi pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis dan referensi utama dalam penelitian ini, yang mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kegiatan studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan, menelaah, dan memahami berbagai teori, konsep, serta temuan empiris yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh gambaran mengenai perkembangan kajian sejenis serta posisi penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, studi pustaka membantu peneliti dalam merumuskan variabel penelitian, menyusun kerangka pemikiran, dan menentukan metode penelitian yang tepat. Pelaksanaan penelitian diharapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat serta mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis.

3.4. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diteliti untuk menarik kesimpulan. Populasi tidak sekadar mencakup jumlah objek atau subjek yang

diteliti, tetapi juga mencerminkan seluruh sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian ini berjumlah 99 orang mencakup pengurus dan seluruh anggota (KTH) Rimbe Pasmah.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mencakup sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ketika populasi terlalu besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semuanya karena keterbatasan dana, sumber daya, atau waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dalam pengumpulan data, menggunakan teknik random sampling, yaitu metode pengambilan sampel secara acak dari total populasi sebanyak 99 orang anggota KTH Rimbe Pasmah dimana mereka mempunyai peluang yang sama untuk dipilih, dan dengan banyaknya populasi yang digunakan, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10 % (Yamane, 1973 dalam Rusman, 2018). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu dengan rumus slovin sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah *Sample*

N = Jumlah Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*) 10%

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

$$n = \frac{99}{1 + (99 \cdot 0,1^2)}$$

$$n = \frac{99}{1 + 0,99}$$

$$n = \frac{99}{1,99}$$

$$n = 49,75$$

$$n = 50 \text{ Responden}$$

3.5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat lebih lanjut untuk menyusun dan menganalisis tingkat pendapatan KTH terhadap perumahan sosial Desa Mulyosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan. Analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan KTH menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda, untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen (pekerjaan, lama pekerjaan, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan diluar kegiatan perumahan sosial) terhadap pendapatan KTH. Menurut Seta *et al.*, (2021) dalam menentukan variabel atau faktor pendapatan dapat dilihat melalui karakteristik dari pengaruh pendidikan, jenis pekerjaan, luas lahan garapan, dan usia pekerja.

1. Analisis Deskriptif dengan perhitungan rata-rata pendapatan rumah tangga/tahun, pendapatan rumah tangga/bulan dan tingkatan pendapatan dengan standar UMK Lampung Selatan.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik data yang diperoleh dari responden secara sistematis. Data yang dianalisis meliputi pendapatan rata-rata rumah tangga per tahun, pendapatan rumah tangga per bulan, serta tingkat pendapatan rumah tangga berdasarkan pembandingan UMK Lampung Selatan. Seluruh data disajikan dalam bentuk tabulasi agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Perhitungan rata-rata pendapatan dilakukan menggunakan rumus rata-rata pendapatan menurut Olivi *et al.*, (2015) sebagai berikut

$$X_i = \sum \frac{x_i}{n}$$

Keterangan:

- X_i = data pendapatan ke-i
- n = jumlah data (responden)

2. Perhitungan dengan Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan melalui uji t (uji parsial) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, serta uji F (uji serempak) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rumus menurut Gujarati (1998) dalam Della *et al.*, (2023), sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1[X_1] + \beta_2[X_2] + \beta_3[X_3] + \beta_4[X_4] + \beta_5[X_5] + e_i$$

Keterangan :

Y= Pendapatan Kelompok Tani

β_0 = Konstanta

X1= Usia Responden (tahun)

X2= Variabel Dummy tingkat pendidikan responden

(SD= 6, SMP= 9, SMA=12, PT= 16)

X3= Pekerjaan Utama

X4= Luas Lahan (ha)

X5= Jumlah Jenis Tanaman

β_1, β_2 = Koefisien regresi

e_i = Nilai eror (faktor pengganggu) yang dalam hal ini merupakan factor-faktor yang tidak dimasukkan dalam model

a) Uji F Regresi *Analysis of variance*

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Muthaharah *et al.*, 2022).

$$F = R^2/k / (1-R^2)/ (n-k-1)$$

Keterangan:

R= Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah total sampel/responden

F = Nilai statistik F yang dibandingkan dengan F tabel

Jika F hitung $< F$ tabel, maka model regresi dinyatakan signifikan secara simultan, artinya seluruh variabel independen berpengaruh bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika F hitung $> F$ tabel, maka model tidak signifikan, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen.

b) Uji T Regresi Linear

Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen (Mulyanti *et al.*, 2024).

Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$t = \beta_i / \text{Se}\beta_i$$

Keterangan:

β_i = Koefisien regresi dari variabel ke- i

SE = Standar error dari koefisien β_i

Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial.

Jika Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak $\rightarrow$ terdapat pengaruh signifikan

Jika Sig $> 0,05$, maka H_0 diterima $\rightarrow$ tidak terdapat pengaruh signifikan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tingkat pendapatan responden KTH Rimbe Pasmah yang telah memiliki persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dikategorikan rendah yaitu Rp2.396.000/bln. Dengan klasifikasi pendapatan menggunakan pembanding Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Selatan sebesar Rp3.076.990/bulan.
2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan responden KTH Rimbe Pasmah, diperoleh bahwa variabel luas lahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan, dengan nilai *P value*= 0,027.

5.2. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar KTH Rimbe Pasmah meningkatkan kapasitas anggota melalui pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/swasta atau pihak lainnya secara berkala, pendampingan usaha, selain itu memaksimalkan penanaman jenis tanaman bernilai jual tinggi, mengembangkan usaha KUPS, serta diharapkan adanya penelitian lanjutan pada tahun berikutnya terkait Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Perhutanan Sosial, agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.
2. Adanya penguatan kelembagaan dengan sesama anggota agar kegiatan perencanaan, pengelolaan hasil hutan, serta pembagian manfaat dapat berjalan lebih efektif dan juga dapat menumbuhkan semangat para anggota. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti jumlah

tanggungan keluarga, teknik pemasaran, atau modal usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan anggota KTH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. 2020. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*. 7(1): 1–20.
- Adrayanti, S., Muhammad, D., Sri, E. N. I. 2022. Modal sosial masyarakat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Buhung Lali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuasiasia*. 8(1): 94–101.
- Akbar, R., Lestari, R., Putra, A. 2023. Pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap kesejahteraan rumah tangga petani. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 24(1): 55–67.
- Armadinata, M., Pharmawati, N. 2019. Pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif masyarakat pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*. 12(2): 89–98.
- Ardhy, M. A. 2022. Pengaruh pendidikan, umur, dan pengalaman terhadap pendapatan petani padi di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 10(1):14–25.
- Ayudanti, K. 2017. Analisis efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (studi pada hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung. *Skripsi*
- Awang, S. A., Widayanti, W., Rosyidah, A. 2020. Evaluasi implementasi perhutanan sosial dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat. *Jurnal Hutan Lestari*. 8(2): 112–123.
- Bangsawan I, Hardjanto, Hero Y. 2016. Dinamika kelompok tani dan pembangunan hutan rakyat di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 13(1). 1-12.

- Della, S. D., Fitriyanti, S., Hartatiana. 2023. Penerapan metode analisis regresi linear berganda terhadap faktor-faktor pendapatan pengusaha kos di kecamatan Kemuning Kota Palembang. *DJMA: Diophantine Journal of Mathematics and Its Applications*. 2(2): 59-70.
- Dewi, I. N. 2018. Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial. *Info Teknis EBONI*. 15 (2): 65 – 77.
- Fardiansyah, D., Kusuma, B. A., Pathiassana, T. M. 2022. Kajian penerapan model Agrosilvopastura dalam peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Kelompok Tani Hutan Sorowua Desa Paradowane Kecamatan Parado. *Jurnal Tambora*. 6(2): 66-77.
- Fauzi, M., Nahlunnisa, H. 2021. Studi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di desa Senggigi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Sylva Samalas*. 4(1): 20-26.
- Fudjaja, F., Fitri, N. 2019. Pengaruh gestation period usaha tani terhadap pendapatan petani kecil di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 3(3): 511–520.
- Haikal, F., Darmawan, A., Kaskoyo, H., Safe'i, R. 2020. Pentingnya pemantauan kesehatan hutan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*. 4(1):31-43.
- Huzaini, M., Jufri, A., Arkandia, D. 2023. Pengelolaan hutan kemasyarakatan dilihat dari perspektif islam di kawasan hutan Sesoat Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(1): 493-499.
- Ihsaniyati, H., Lestari, E., Khumairotusyifa, L. 2020. Persepsi Pemuda Desa di Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, Terhadap Pekerjaan sebagai petani. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agribisnis UNS*. 260-268. 4(1).
- Irwanto, I., Hatulesila, J. W., Talaohu, M., Ely, A. S. 2022. Kombinasi jenis tanaman pola dusung pada berbagai ketinggian tempat di Negeri Luhu Seram Barat. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*. 6(1): 94–108
- Istiqomah., Udiansyah., Fauzi, H. 2021. Kinerja kelembagaan kelompok tani hutan pemegang izin perhutanan sosial di wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan Kayutang. *Jurnal Sylva Scienteae*. 4(3): 440-451.
- Juniarti, R., Amin, H. 2017. Pengaruh usia terhadap produktivitas tenaga kerja pada sektor informal. *Jurnal Sosial Humaniora*. 8(2): 115–124
- Kandari, A. M., Kasim, S. 2021. Pengembangan tanaman multi guna bagi masyarakat di kawasan taman hutan raya nipa-nipa Kelurahan Gunung Jati, Kota Kendari. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. 7(3). 258–268.

- Kaskoyo, H., Mohammed, A. J., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A case study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3), 250-263.
- Khusniatin, D., Taufiq, A., Kasiami, S. 2023. Implementasi program perhutanan sosial di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020: Studi Kasus Di LMDH Jati Makmur Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. *JLAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*. 7(1):1-10.
- Lakat., Ricky, S. M., Octavianus, H. A., Rogi., Sawo, K. M. 2021. Analisis pengembangan Kawasan permukiman berdasarkan kemampuan lahan di distrik Muara Tami. *Jurnal Spasial*. 8(3): 311-325.
- Lawasi, M. A. 2024. *Unveiling the shortcomings of social forestry programs in Indonesia: A critical analysis*. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(3): 145–160.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Krott, M. 2012. *Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry*. *Forest Policy and Economics*. 14(1): 1–5.
- Mahardika, A., Muyani, S. H. 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 1(1): 1-9.
- Minarningsih, M. 2022. Komposisi, keragaman dan profil tanaman agroforestri di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (*Composition, Diversity, and Profile of Agroforestry Plants in Wan Abdul Rachman Grand Forest Park*). *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*. 19(2): 91–110
- Mulyanti, M., Maulani, D., Arifin, R. 2024. Analisis regresi berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi burnout syndrome. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida*. 11(1): 11–18.
- Muthahharah, I., Fatwa, I. 2022. Pemodelan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah menggunakan metode regresi ridge dan regresi stepwise. *Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya)*. 10(1): 45–55.
- Mukuka, R. M., Hichaambwa, M. 2018. Livelihood effects of crop diversification: a panel data analysis of rural farm households in Zambia. *Food Security*. 1449–1462.
- Norfahmi, F., Winandi, R., Nurmalina, R., Kusnadi, N. 2020. Dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan non pertanian pada rumah tangga petani padi di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Pengkajian dan Pengeimbangan Teknologi Pertanian*. 23(1): 1-10.

- Novayanti, D., Febriyano, G. I. Safe'i, r., Banuwa, S. I. 2018. Strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di KPH Gedong Wani. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. 20 (1): 29-28.
- Nurfatريان, F dan Alviya, I. 2019. Efektivitas Kebijakan Alokasi Lahan 12,7 Juta Ha Untuk Perhutanan Sosial: Studi Kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 6 (1): 47-66.
- Oktoriana, S., Sudrajat, J., Fatwa, I. M. 2024. Kontribusi sektor non pertanian terhadap pendapatan rumah tangga (Studi Kasus di Desa Jirak Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas). *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 10(2): 3405-3412.
- Olivi, R., Qurniati, R., Firdasari. 2015. Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 1-12.
- Pariasa, I. M., Hardana, A. A. 2024. Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani sayur di Kecamatan Baturiti. *Jurnal Agribisnis dan Pertanian Berkelanjutan*. 6(1): 23–34.
- Pratiwi, S. 2021. Produktivitas berbagai jenis tanaman pada sistem agroforestri. *Jurnal Agrotek Tropika*. 9(2): 112–121.
- Rahayu, M. E., Triwanto, J. 2021. Penyuluhan perhutanan sosial di kelompok tani hutan Kota Malang. *Jurnal Budimas*. 3(2):548-558.
- Rahman, F., Jalaluddin, M. 2022. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Bali. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 14(1):51-60.
- Rais, D. 2019. Partisipasi perempuan dalam kelompok tani dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Agrosocionomics*. 3(1): 45–53.
- Rakatama, A., Randit, R. 2022. Reviewing social forestry schemes in indonesia: opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*. 11 (1): 1-24.
- Ramadhan, N. M., Abdulla, A. A. Sribianti, I., Hasanudi., Mutmainah. 2022. Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) terhadap pendapatan kelompok tani hutan di Desa gunung Silanu Kabupaten Jenopote. *Jurnal Kehutanan Papua*. 8(1): 79-86.
- Ramadhan, R., Afiq, M. D., Anggara, A., Triwanto, J. 2025. *Community Welfare and Forest Sustainability in Social Forestry Programs: A Case Study of KTH Bhakti Alam Lestari in Malang, East Java. Indonesian Journal of Forestry Research*. 12(1): 13–26.

- Rana, P., Razak, A., Khandoker, S. 2023. Age, Labor Capacity, and Household Economic Productivity: Evidence from Rural Communities. *Journal of Rural Human Resource Management*. 5(1):12–25.
- Riski A. Danial, M. I., Muhlis, Putra, R. P., Ramli, H., Annisa, I. W. R. 2025. Penyuluhan Perhutanan Sosial pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Kabupaten Gorontalo. *Vokatek: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(2): 69–74.
- Rosalia, F., Ratnasari, Y. 2016. Analisis pengelolaan hutan kemasyarakatan di sekitar kawasan hutan lindung register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tahun 2010. *Sosiohumaniora*. 18 (1): 34 – 38.
- Rohiman, L. O., Syamsinar, S., Baso, T. A. K., Said, A., Yunus, A (2025. Analisis Aspek Lingkungan, Ekonomi, dan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Lereng Ambeso Kabupaten Tana Toraja Dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Sosial dan Sains*. 5(10), 2025.
- Rusman, T. 2014. *Bahan ajar :Buku Statistika*. Fkip Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ruhlia, R. 2018. Pengaruh luas lahan terhadap pendapatan petani hortikultura di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 23(2): 50–158.
- Safe'i, R., Febryano, I. G. Aminah, L. 2018. Pengaruh keberadaan gabungan kelompok tani terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan. *Jurnal Sosiohumaniora*. 20(2), 109-114.
- Sanjaya, R. 2016. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2): 22-64.
- Saputra, D., Siswahyono., Suhartoyo, H. 2021. Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di kawasan hutan produksi terbatas air bengkenang Kecamatan air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. *Journal of Global Forest and Environmental Scienc*. 1(1): 10-18.
- Seta, K., Zamrodah, Y., Budiman, W. E., Prayudi, A. L. 2025. Faktor yang mempengaruhi pendapatan petani Jagung : Studi kasus Perhutanan sosial, Desa Karangbendo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pertanian*. 15(1): 23-30.
- Setiawina, D.N., Putri, D.A. 2020. Pengaruh umur, pendidikan, pekerjaan, terhadap pendapatan rumah tangga miskin di Desa Bebandem. *Jurnal EP-Unud*. 2(4): 178-180.

- Siadauruk, T., Simanjuntak, P., Paujiah, A., Sipayung, A., Sinaga, P. 2024. Dampak perubahan iklim terhadap penurunan pendapatan petani. *Journal on Education*. 6(4): 22097-22103.
- Sianipar, B dan Tangkudung, A.G. 2020. Tinjauan ekonomi, politik, dan keamanan terhadap pengembangan *Food Estate* di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Keamanan Nasional*. 4(2):235-248
- Simarmata, M., Tarigan, W. 2023. Pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan ekowisata oleh kelompok tani hutan di Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*. 3(1). 33-43.
- Suprianto, K. I. 2023. Pemanfaatan hutan produksi Desa Balaroa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*. 1(2): 155-159.
- Toha, M., Wihadanto, A., Nurhasanah. 2023. Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *Jurnal Hutan Tropis*. 7(2): 17-25.
- Totok, M dan Poerwoko, S. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Utami, N. W., Darwanto, D. H. 2021. Analisis risiko dan ketidakpastian usaha tani di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 39 (1): 1–14.
- Wibowo, A., Suryani, E. 2018. Pengaruh luas lahan, jenis komoditas, dan produktivitas terhadap pendapatan petani di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. 36(2):159–170.
- Winata, N.G. A.W., Basuki, P., Karismawan, P. 2015. Analisis determinan pendapatan petani program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*. 1(1).
- Witno., Maria., Supandi, D. 2020. Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tandung billa di Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*. 2(2): 35-42.
- Wulansari, D., Abidin, Z., Hafizianor. 2022. Strategi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan Hutan di wilayah kerja kesatuan pengelolaan hutan (Kph) Pulau Laut Sebuku. *Jurnal Hutan Tropis* 10(2): 170-176.
- Yeni, I., Murniati., Suharti, S. 2020. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan agroforestri di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 17(1): 49-66.